

JURNAL

**EFEKTIFITAS PASAL 23 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERKAIT JARAK
PENDIRIAN MINIMARKET DENGAN PASAR TRADISIONAL.**

(Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Maharani Fathia

NIM. 0910110047



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

ABSTRAKSI

MAHARANI FATHIA., Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional.*” (Studi Kasus di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang)” Lutfi Effendi, S.H. M.Hum ; Dr.Iwan Permadi, S.H. M.H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional, peraturan tersebut menyatakan jarak pendirian Toko Modern atau minimarket hanya dapat dilakukan dengan jarak lima ratus meter antara minimarket dengan pasar tradisional, pada kenyataannya masih banyak pasar tradisional dengan letak minimarket yang kurang dari lima ratus meter. Peraturan tersebut ada sesungguhnya ada untuk melindungi kepentingan pedagang kecil, oleh karena itu pengawasan peraturan tersebut perlu ditegakan.

Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional. 2) Apa hambatan yang dihadapi oleh badan pelayanan perijinan terpadu dalam penerapan pasal 23 ayat 2 Peraturan Daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010 dan bagaimana upaya untuk menghadapi hambatan tersebut.

Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Faktor penghambat, antara lain Tenaga dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang yang minim, belum dibentuk dalam struktur kepegawaian untuk peninjauan di lapangan terkait pemberian SIUP (Surat Ijin perdagangan), Kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah terkait ketentuan pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, Budaya membuat usaha melalui franchise atau biasa dikenal dengan waralaba memang sudah membudaya di masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Malang untuk mengatasi faktor penghambat adalah menambah tenaga dari badan pelayanan perijinan terpadu yang minim, membuat anggaran dana yang tersedia dari pemerintah untuk melakukan pengawasan, menambah jumlah sosialisasi ke pedagang pasar dan pengusaha, mengurangi budaya membuat usaha melalui franchise.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya jika Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan di pertahankan, tinggal pengawasannya yang perlu untuk ditingkatkan.

Kata Kunci : Efektifitas, Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan

ABSTRACT

MAHARANI FATHIA., State Administrative Law, Faculty of Law, UB, The Effectiveness of Article 23 Paragraph 2 of Regulation Malang District No. 8 of 2010 on the Implementation of Business Industry and Trade Related Distance Establishment Minimarket With Traditional Markets. "(Case Study on Service Agency Integrated licensing Malang) " Lutfi Effendi, S.H. M.Hum ; Dr.Iwan Permadi, S.H. M.H

In writing this paper the author discusses the effectiveness of Article 23 Paragraph 2 of Malang Regional Regulation No. 8 of 2010 on the Implementation of Business Industry and Trade Related Distance Establishment Minimarket With Traditional Market, the regulation states within the establishment or mini Modern Store can only be done at a distance of five hundred meters between mini-traditional markets, in reality there are many traditional markets with the location minimarket less than five hundred feet. The regulation was actually there to protect the interests of small traders, therefore regulatory oversight needs to be upheld.

Formulation of the problem studied in this thesis are: 1) How Effective Article 23 Paragraph 2 of Malang Regional Regulation No. 8 of 2010 on the Implementation of Business Industry and Trade Related Distance Establishment Minimarket With Traditional Market. 2) What are the barriers faced by the agency in the implementation of an integrated licensing services pasal 23 paragraph 2 of the area of Malang number 8 in 2010, and how efforts to address these barriers.

To answer the problem under study, the authors use the method of approach used in this empirical study is juridical-sociological approach.

Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, namely inhibiting factors, among others, Power of Integrated Service Agency Permission Malang is minimal, yet to be established for reviewing the staffing structure in the related field giving SIUP (Permit trading), lack of socialization government officials provisions of article 23, paragraph 2 of the area of Malang city ordinance No. 8 of 2010 regarding business industry and trade, culture making business through franchise or commonly known as the franchise was already entrenched in the community. City government's efforts to address the factors inhibiting Malang is the added power of integrated licensing pelayana body is minimal, making the budget funds available from the government to conduct surveillance, increasing the number of socialization into the market traders and entrepreneurs, reduce culture to make business through franchising.

Responding to the things mentioned above, then it should if Malang Regional Regulation No. 8 of 2010 Concerning the implementation of trade and industry efforts on hold, stay oversight that needs to be improved.

Keywords: Effectiveness, Regulatory Area, Business Implementation of Industry and Trade

A. Pendahuluan

Kebijakan otonomi daerah menjadi pemicu banyaknya lahir Perda di berbagai tingkatan propinsi dan kabupaten. Kebijakan tersebut memunculkan berbagai peraturan pendukung untuk melegitimasi konsep otonomi daerah antara lain : UU No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Instrument hukum dari Pemerintahan Pusat inilah yang dijadikan landasan dan acuan dalam penyusunan aturan di tingkat daerah dalam bentuk Perda.¹

Sejalan dengan konsep otonomi daerah yang memberikan porsi yang lebih besar kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, salah satu faktor utama dalam merealisasikan konsep otonomi daerah ialah dengan produk hukum (Perda).

Semenjak Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998 yang mengharuskan diterapkannya segala program liberalisasi. Hal tersebut berujung pada ditandatanganinya *letter of intent* dengan IMF yang memberikan peluang besar kepada investasi asing untuk masuk di Indonesia.² Salah satunya di bidang industri ritel. Sejak saat itu, peritel-peritel asing atau pasar modern mulai berdatangan dan meramaikan industri ritel Indonesia. Pengusaha pasar modern sangat aktif untuk melakukan investasi baik itu dalam skala Hypermarket, Supermarket dan Minimarket. Salah satu contohnya adalah Continent, Carrefour, Hero, Walmart, Yaohan, Lotus, Mark & Spencer, Sogo, Makro, Seven Eleven, dan Circle K. Begitu juga dengan pengusaha lokal yang membangun usaha minimarket seperti Indomaret dan alfamaret, alfa midi dan alfa express. Hadirnya perusahaan tersebut sekarang membebani usaha kecil.

Kehadiran minimarket jelas mengurangi pendapatan pedagang yang selama ini menghidupi keluarga pedagang tradisional. Pemerintah setempat seolah tidak mau tahu dengan mudah memberikan izin pembangunan. Akibatnya tidak sedikit warga yang melakukan protes. Masyarakat setempat melakukan protes sebagai bentuk kekecewaan terkait keberadaan minimarket. Masyarakat beranggapan minimarket-minimarket sekarang ini telah merusak perekonomian pedagang tradisional. Seperti halnya pasar tawangmangu, letak minimarket indomaret dan

¹ Huma. "*Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Teori & Praktek*". (Jakarta Sinar Grafika, 2007), hlm 88

² Harvey, David, Januari. "*Neoliberalisme & Restorasi Kelas Kapitalis*". (Yogyakarta :Resist Book, 2009), hlm.24

alfamaret tersebut, sangat dekat dengan pasar tawangmangu yang hanya berjarak sekitar 50 meter. Padahal, mestinya berdasarkan peraturan yang ada, jarak antara minimarket dengan pasar tradisional harus 500 meter. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan.³

Merespon keresahan masyarakat tersebut, pemerintah daerah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan. Pertimbangan dikeluarkannya Perda ini adalah bahwa usaha perindustrian dan perdagangan sangat penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan industri dan perdagangan di daerah perlu diatur dengan memperhatikan kemampuan modal usaha, iklim usaha dan investasi serta kelestarian lingkungan.

Bertumbuhnya minimarket khususnya Indomaret di Kota Malang belakangan ini, dianggap secara tidak langsung mengancam dan melumpuhkan pedagang tradisional. Karena itu pemerintah daerah diminta memikirkan nasib pedagang kecil yang bisa saja kehilangan mata pencaharian akibat tergilas perusahaan besar. Pemerintah diwajibkan mengkaji ulang pemberian izin pendirian minimarket-minimarket tersebut.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan dibentuk dengan mengingat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan; memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern; pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib

³ <http://nasional.inilah.com.matikan-pedagang-tradisional-minimarket-disegel>, diunduh pada 28 oktober 2012

persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Untuk menegaskan Perpres No. 112, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Permendag No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Aturan ini, lebih rinci mengatur mengenai zonasi, perjanjian perdagangan (trading term) dan perizinan.

Kontribusi pasar tradisional terhadap masyarakat dan pemerintah kota Malang tidak bisa dianggap tidak begitu penting. Dari beberapa pasar tradisional, seperti Pasar belimbing, Pasar dinoyo, pasar tawangmangu, dll, omzet yang disumbangkan untuk pendapatan asli daerah dibidang retribusi baik sampah dan kios terbilang besar.

Dalam proses penyusunan Perda, berbagai pihak menilai bahwa keterlibatan publik dan pemerintah yang terkait dirasa sangat kurang. Walaupun keterlibatan publik tidak menjadi suatu kewajiban tetapi menjadi ironi ketika suatu aturan yang tujuan dasarnya melindungi keberadaan pasar tradisional, justru tidak melibatkan peran pedagang pasar tradisional dalam perumusan suatu Perda.

Alih-alih meningkatkan daya saing pasar tradisional lewat aturan Perda, kenyataan justru sebaliknya. Implementasi Perda dilapangan dirasa tidak berjalan sesuai harapan. Banyak sekali toko modern yang jaraknya sangat berdekatan dengan pasar tradisional, sebut saja Pasar Tawangmangu dengan alfamart, padahal Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, sudah menyebutkan secara implisit, yaitu:

- (1) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.
- (3) Tata cara pendirian Toko Modern akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Badan pelayanan perijinan terpadu dalam penerapan pasal 23 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 8 tahun 2010 dan bagaimana upaya untuk menghadapi hambatan tersebut?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan terkait jarak Minimarket dengan Pasar tradisional, merupakan jenis penelitian empiris.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis ini digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis.⁴

Secara yuridis penelitian ini memfokuskan pada pasal Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, sedangkan secara sosiologis penelitian ini fokus mengkaji tentang efektifitas pelaksanaanya di lokasi penelitian.

Jadi penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).⁵

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi :

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 20

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

- 1) pengalaman BP2T dalam melakukan pengawasan,
 - 2) pengalaman BP2T tentang faktor-faktor yang menghambat dalam melaksanakan Perda secara efektif,
 - 3) pengalaman Pedagang Pasar dalam menyikapi perkembangan usaha minimarket.
 - 4) Pengalaman pengusaha minimarket dalam pendirian usaha.
- b. Data Sekunder
- Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang ditemukan dilapangan, baik dari instansi pemerintah atau swasta.

b. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pengawas BP2T, pedagang pasar tradisional, pengusaha.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen di Disperindag.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

a. Data Primer

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara (*interview*). Wawancara atau interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan langsung antara dua orang atau lebih.⁶ Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (*indirect interview*) yang memperhatikan :

- a. Rencana pelaksanaan wawancara.
- b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.
- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, penelusuran internet, dan studi

⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm 22

dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi dengan mengutip data dari sumber yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh diolah kemudian di analisis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* melalui proses editing, proses tabulasi data primer, serta proses interpretasi dari data tersebut yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk uraian kalimat. Dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Analisis difokuskan pada efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, Selanjutnya juga dideskripsikan mengenai pendukung dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan

D. Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis Daerah

Kota Malang, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

b. Visi dan Misi Kota Malang

Dalam rangka mewujudkan visi kota malang, maka dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan ke dalam misi kota malang tahun 2009-2013 yaitu:

1. Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan pendidikan yang berkualitas
2. Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan
4. Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya
5. Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya
6. Mewujudkan pelayanan publik yang prima

c. Kondisi Ekonomi Kota Malang

Selain terkenal dengan kota pelajar kota Malang juga terkenal dengan penghasil apel dan keripik tempe. Mayoritas penduduk di kota Malang dan sekitarnya merupakan pembuat makanan khas malang tersebut menjadi keripik apel, keripik tempe, dan keripik buah-buahan lainnya. Karena terkenal dengan penghasil keripik tempe dan keripik buah-buahan lainnya maka penduduk sekitar membuka kios-kios disekitar tempat wisata agar pengunjung dapat membeli oleh-oleh tersebut sebagai buah tangan untuk dibawa ke daerah masing-masing. Banyaknya penghasil pusat oleh-oleh tersebut membuat semakin banyaknya sentra oleh-oleh di kota Malang dan juga semakin banyaknya ruko di kota Malang.

Potensi Ekonomi Kota Malang meliputi produk-produk sebagai berikut:

1. Keramik

Lokasi : Kerajinan ini berpusat di daerah Dinoyo - Mt Haryono.

Bahan : Tanah Keramik

2. Gerabah

Lokasi : Kerajinan ini berpusat di daerah Mayjen Panjaitan – Malang

Bahan : Tanah Liat

3. Keripik tempe

Lokasi : kerajinan ini berpusat di daerah sanan – Malang

Bahan : Kedelai

4. Industri makanan

Lokasi : Tersebar di seluruh kota Malang

Bahan : Sembako dan makanan ringan

5. Rotan

Lokasi : kerajinan ini hampir ada di seluruh Malang

Bahan : Kayu rotan⁷

Dari hasil data diatas menunjukan bahwa betapa banyaknya industri di kota Malang, ini menunjukan bahwa pesatnya perekonomian di kota Malang dari industri kecil, menengah dan atas.

2. Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional

Efektifitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.⁸ Dalam penelitian ini tinjauan terhadap efektifitas lebih dikhususkan kepada tingkat pelaksanaan pada penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan.

Secara konsepsional, maka inti dari efektifitas hukum terletak pada bagian menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

⁷ <http://www.malangkota.go.id> dinunduh tanggal 1 Februari 2013

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), hlm 1-2.

menciptakan, kemudian, dan mempertahankan bagaimana menjaga keharmonisan dalam kehidupan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa masalah utama dari efektifitas penegakan hukum sebenarnya terletak dari indikator yang memungkinkan dapat dikatakan efektif atau tidak. Indikatornya mempunyai arti netral. Sehingga dapat muncul sisi positif atau negatif yang terletak pada isi indikator.

Terkait Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional Indikator untuk menentukan efektifitas penegakan hukumnya sebagai berikut:

a. Indikator hukum tertulis (subtansi)

Dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, Hukum tertulis tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara, peraturan pusat dapat kita lihat dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan.

Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. peraturan daerah dapat kita lihat dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan, yang di buat dengan mengingat beberapa peraturan daerah.

Sesungguhnya dari serangkaian peraturan tersebut di atas mengarah pada perlindungan pengusaha kecil. Peraturan terkait masalah yang di kaji dalam penelitian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkap, termasuk masalah sanksinya.

Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, menyebutkan :

- (2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan, Toko modern atau mini market hanya dapat berdiri pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro. Mengingat peraturan tersebut

menyangkut hajat hidup masyarakat yang mencari rejeki dari pasar tradisional, seharusnya SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) tidak dapat di buat, jika bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan.

b. Indikator penegak hukum (struktur)

Indikator penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Terkait penelitian yang diambil peneliti, Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional, penegak hukum disini adalah beberapa pejabat Pemerintah Daerah, yakni Dinas perindustrian dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.

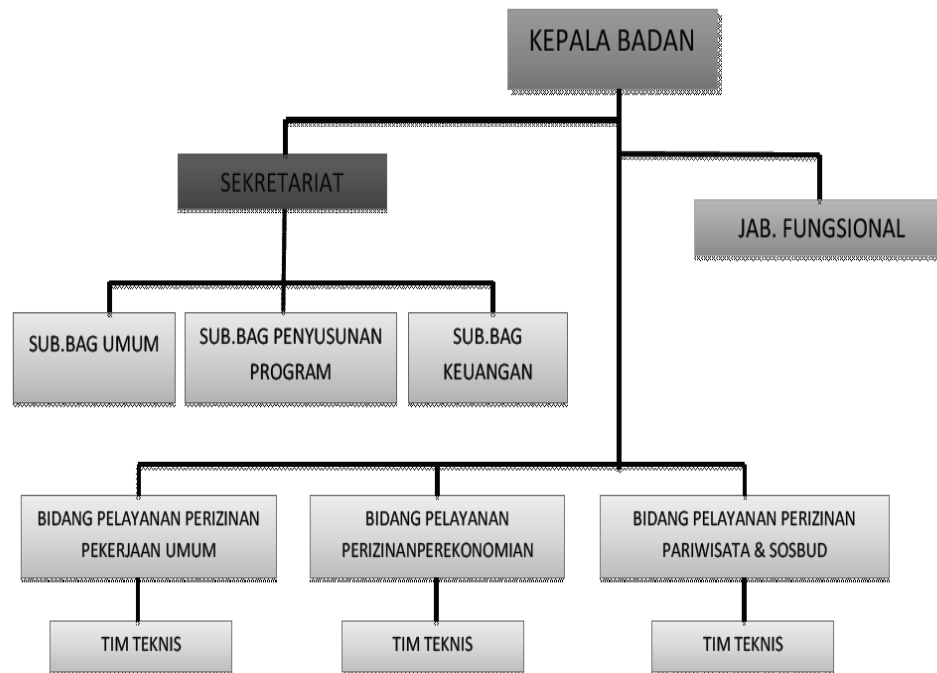
Berikut akan diuraikan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yakni:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha ;
- d. Sub Dinas Penyusunan Program ;
- e. Sub Dinas Bina Produksi ;
- f. Sub Dinas Bina Sarana ;
- g. Sub Dinas Bina Usaha ;
- h. Sub Dinas Perclagangan Dalam Negeri ;
- i. Sub Dinas Perclagangan Luar Negeri ;
- j. Sub Dinas Metrologi ;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;.

Organ pemerintah sebagai penegak hukum terkait masalah penelitian, yakni Terkait penelitian yang diambil peneliti, Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional, adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.

Berikut akan di uraikan Struktur Organisasi BP2T (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu):

Skema ; Struktur Organisasi BP2T



Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang, terletak di Perkantoran Terpadu Gedung A Lt. 2, Jl. Mayjen Sungkono-Malang, Jawa Timur. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang Tahun 2012 adalah Bapak Suharyono.

Badan pelayanan perijinan terpadu kota Malang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

“Pelayanan Perijinan Satu Pintu, yaitu Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan oleh BP2T Kota Malang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Malang, mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemrosesan, Penandatanganan Keputusan Perijinan dan Pembayaran Retribusi/Pajak Perijinan dilaksanakan oleh BP2T Kota Malang. Sehingga masyarakat yang mengurus atau mengajukan permohonan Perijinan hanya di BP2T Kota Malang.”⁹

Misi :

⁹ www.malang.kota.go.id/visi_misi diunduh 1 februari 2012

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Perijinan yang Cepat, Tepat, Akurat, Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatkan dan Membentuk Kualitas Aparatur Perijinan yang Profesional di BP2T Kota Malang didalam melayani masyarakat di bidang perijinan.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasana Perijinan terutama pada tempat serta Alat kerja yang memadai.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD terkait guna mempercepat proses perijinan dengan membentuk Tim Pertimbangan Ijin dan Tim Teknis.
5. Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang perijinan.

Di Jalan Sarangan terdapat Alfamart, letaknya hanya kurang dari 500 meter dari Pasar Tawangmangu dan terdapat alfamart dan indomaret yang bersebelahan yang hanya terpisahkan dengan sebuah rumah makan cepat saji. Hal ini mewujudkan bahwa aparat penegak hukum tidak siap menjalankan kewajibannya. Seharusnya, perubahan sikap atau dinamika sosial yang terjadi di masyarakat sekitar jalan Tawangmangu dan pedagang di pasar menjadi fokus perhatian pemerintah.

Dalam hasil wawancara dengan pedagang Pasar Tawangmangu di peroleh hasil atau data, sebagai berikut:¹⁰

“ Pasar sekarang sepi, hanya penjual sayur dan buah yang lumayan, untuk makan ringan dan sembako sekarang sepi, sekarang banyak alfamart dan Indomaret. “

Dari hasil wawancara di atas membuktikan bahwa, masyarakat sesungguhnya sangat terusik dengan keberadaan mini market. Bagaimana penegak hukum sebaiknya menangani problematika ini, jawaban satu-satunya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum adalah sebaiknya SIUP tidak diberikan.

c. Indikator sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dikatakan efektif. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain: Mencakup tenaga

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ningsih, penjual sembako di Pasar Tawangmangu ,Malang; 2 November 2012.

manusia yang berpendidikan dan organisasi yang baik. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Suharyono, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Kota Malang di peroleh hasil atau data, sebagai berikut:¹¹

“ tenaga pegawai kami semua disini sebagaian besar adalah sarjana dan magister ekonomi dan hukum untuk jabatan-jabatan tertentu ada lulusan D III, DI dan khusus pegawai honorer lulusan SMA .“

Dari hasil interview di atas dapat disimpulkan, bahwa tenaga di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaian besar adalah tenaga-tenaga berpendidikan, yang di dalamnya di dominasi sarjana ekonomi dan hukum.

d. Indikator Masyarakat (kultur)

Masyarakat yakni lingkungan, di mana hukum tersebut akan diterapkan. Efektif tidaknya penegakan hukum berasal dari masyarakat, karena hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat disini bisa dari pemilik usaha minimarket, masyarakat umum dan penjual di pasar di sekitar pasar tawangmangu.

e. Indikator Kebudayaan

Indikator kebudayaan adalah sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan.¹²

Budaya membuat usaha melalui franchise atau biasa dikenal dengan waralaba memang sudah membudaya di masyarakat, karena keuntungannya yang menggiurkan, tanpa bersusah payah membangun usaha dari awal.

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak suharyono, kepala badan pelayanan perijinan terpadu ,Malang; 2 November 2012.

¹²<http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/11/hukum-ketenaga-kerjaan-efektifitas.htm>,log.cit. diunduh 2 November 2012

3. Faktor Penghambat Penerapan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan

Dalam pelaksanaan di dalam masyarakat peraturan daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan menemukan hambatan.

hambatan tersebut meliputi :

1. Belum dibentuk dalam struktur kepegawaian untuk peninjauan di lapangan terkait pemberian SIUP (Surat Ijin perdagangan), selama ini yang ada hanya ijin gangguan kecil, ijin gangguan besar dan ijin reklame permanen.¹³
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan aparat merupakan faktor penghambat yang paling utama, karena masyarakat tidak tahu terkait ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, yang menyebutkan :
- (2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Hal tersebut yang mengakibatkan penjual di pasar tersebut tidak pernah menuntut pada pemerintah daerah, dan hanya pasrah menikmati percepatan atau perkembangan minimarket di daerah-daerah.¹⁴

3. Budaya kalangan menengah keatas membuat usaha melalui franchise atau biasa dikenal dengan waralaba memang sudah membudaya di masyarakat, karena keuntungannya yang menjanjikan.¹⁵
4. Semakin berkembangnya minimarket ini mengakibatkan usaha ini terkesan seperti memonopoli pasar, hal ini dibuktikan dengan adanya toko-toko kecil yang sudah mulai tutup akibat maraknya waralaba seperti Indomaret atau alfamart.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Suharyono, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Kota Malang, ; 5 November 2012.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Rohmad, penjual sembako di Pasar Tawangmangu ,Malang; 2 November 2012.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bpk "X", pemilik alfamart, Malang; 6 November 2012.

4. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Malang untuk mengatasi faktor penghambat penerapan pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010

Dalam penerapan pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010 memang menemui hambatan tetapi hambatan tersebut dapat di hadapi dengan cara menghadapi faktor menghambat tersebut dengan cara:

1. menambah Tenaga dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang yang minim, membuat tenaga pengawas dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang untuk peninjauan di lapangan terkait pemberian SIUP (Surat Ijin Usaha perdagangan).
2. membuat anggaran Dana yang tersedia dari pemerintah, untuk melakukan pengawasan.
3. menambah jumlah sosialisasi agar pengusaha dan masyarakat tau mengerti ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan.
4. Budaya membuat usaha melalui franchise atau biasa dikenal dengan waralaba memang sudah membudaya di masyarakat namun dapat di stop dengan adanya ketentuan perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan dengan memperhitungkan jarak antara minimarket dengan pasar tradisional, agar perlindungan bagi usaha kecil dapat terwujud.
5. Jaringan internet yang memberikan informasi mengenai undang-undang terbaru, karena selalu ada mobile internet yang disediakan oleh kemekominfo. Seharusnya ini dapat dijadikan upaya untuk mengatasi hambatan pengusaha untuk mencari informasi peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang banyak berdampak pada perusahaanya.
6. Perusahaan radio yang dapat dilakukan untuk sarana bersosialisasi juga merupakan upaya untuk menghadapi hambatan tersebut, sebut saja RRI, MFM dan masih banyak lagi perusahaan radio yang berkualitas yang mampu menjangkau Kota Malang dalam setiap siarannya dan mungkin memasukan informasi mengenai adanya peraturan daerah kota Malang dan memberikan informasi yang penting kepada masyarakat.
7. Perusahaan majalah dan surat kabar yang melayani jasa advertising yang ada di Malang. Semuanya pasti dapat melayani progam sosialisasi

pemerintah. Perusahaan itu antara lain Radar Malang, Jawa Pos, surya, dll. Semuanya ini sudah tidak asing lagi di masyarakat Malang.

8. LSM yang terus dan bersedia membantu para pedagang pasar yang merasa haknya dirugikan.

H. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Efektifitas pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan terkait dengan jarak pendirian minimarket terhadap pasar tradisional itu tidak efektif karena masih banyak minimarket yang berdiri berdekatan antar minimarket / minimarket berdiri berdekatan dengan pasar tradisional yang jaraknya kurang dari 500 meter padahal dalam pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan telah disebutkan bahwa terhadap pendirian toko modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500(lima ratus) meter antar minimarket,toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro
2. Hambatan yang dialami oleh badan pelayanan dan perijinan terpadu adalah kurangnya tenaga pengawas dari badan pelayanan perijinan terpadu yang mengawasi banyaknya pendirian minimarket di lapangan dan belum dibentuknya struktur kepegawaian untuk peninjauan di lapangan terkait SIUP .
3. Upaya untuk menghadapi hambatan tersebut adalah menambah tenaga pengawas dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang yang minim, membuat tenaga pengawas dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang untuk peninjauan di lapangan terkait pemberian SIUP (Surat Ijin perdagangan), melakukan sosialisasi dengan para pemilik minimarket agar lebih mengetahui tentang adanya pasal 23 ayat 2 peraturan daerah kota Malang nomor 8 tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan terkait jarak pendirian minimarket dengan pasar tradisional.

b. Saran.

1. Melihat regulasi dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, sesungguhnya sudah sangat tepat dan sudah secara implisit mengatur sanksinya, oleh sebab itu

maka sudah selayaknya jika Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan di pertahankan.

2. Pemerintah dalam setiap aktifitasnya terutama yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik, perlu melihat aturan yang mendasarinya. Seperti pada pemberian izin kepada pasar dan toko modern untuk berdiri. Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang (BP2T) dalam memberikan Surat izin pendirian usaha wajib perpedoman dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan.
3. Semakin banyaknya minimarket di kota Malang membuat dampak negatif yang sangat besar terhadap keberadaan pasar tradisional dan sektor informal lainnya. Sehingga sangat perlu dilakukan pengecekan kembali izin dari pendiriannya. Dimana dari hasil penelitian, terdapat minimarket yang menyalahi aturan mengenai analisis dampak sosial ekonomi dari masyarakat dan pelaku-pelaku usaha kecil yang berada disekitarnya.
4. Pemerintah seharusnya tanggap terhadap pendirian minimarket yang melanggar aturan Perda dengan memberikan sanksi yang tegas berupa pencabutan izin usaha.

I. Daftar Pustaka

Buku

Bambang Waluyo, 1991, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta, Sinar grafika
Harvey, David, 2009, **“Neoliberalisme & Restorasi Kelas Kapitalis”**.Yogyakarta : Resist Book

Huma, 2007, **“Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Teori & Praktek”**. Jakarta: Sinar Grafika

Kartini Kartono, 1996, **Pengantar Metodologi Riset Sosial**, Bandung, Mandar Maju
Soerjono Soekanto, 1985, **”Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi,”** Bandung: Remadja Karya

Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press

UNDANG-UNDANG

Pemerintah Propinsi Jawa Timur Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Usaha Perindustrian Dan Perdagangan

Internet

<http://makalahdanskripsi.blogspot./hukum-ketenaga-kerjaan-efektifikas.htm>,log.cit.

<http://nasional.inilah.com.matikan-pedagang-tradisional-minimarket-disegel>

. <http://malang.kota.go.id>